

Implementasi Perda. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2014

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
(Studi Deskriptif tentang Pelayanan Parkir di Taman Bungkul Surabaya)**

Arif Rachman Hakim**S1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya**arifpay.aap@gmail.com**Abstrak**

Pembiayaan pembangunan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Oleh sebab itu setiap daerah harus mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki agar dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan baru. Setiap pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Sumber pendapatan tersebut dapat diperoleh dari potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Sumber pendapatan daerah berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk cukup banyak. Hal tersebut menjadikan retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial bagi kota Surabaya.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Taman Bungkul Surabaya. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan secara *purposive*. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan data yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebut dengan menggunakan teori George C. Edward III.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilihat dari empat variabel yakni Struktur Organisasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Komunikasi. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada taman bungkul tidak berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan pembinaan yang berkesinambungan untuk para Pelaksana Kebijakan atau Implementor dalam hal ini Staf UPTD Parkir Wilayah Timur pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Kata kunci : *Implementasi, Retribusi Pelayanan Parkir.*

Abstract

Local financial development is one of important aspects in local development. That's why in every region have to optimize every potency that they have to be created as new financial resource. Every local government need a funds to finance the reign and to develop in their funds region. That income resource can be getting from local taxes and local retribution. Surabaya is one of the city which have large population. That things make parking retribution is one of potentialy funds of Surabaya.

This research made to describe the implementation of Number 8 2012 Surabaya Local Regulation about Parking Retribution Service at The Road Side at Taman Bungkul Surabaya. This research are using descriptive qualitative method with purposive respondents determination. Data analysis progres are getting from deeply interview, observation, and documentation. Data analysis progress do by grouping and combine the data which is get, and also set the correlatin beetwen data using George C. Edward III theory.

This result of this research describe the implementation of Number 8 2012 Surabaya Local Regulation about parking retribution service at Road Side at Bungkul Park not working appropriately so that need a continuous mentoring for policy subject or implementator in this case is west region parking UPTD Staff at DISHUB Surabaya.

Keyword : *implementation, Retribution Parking Service*

Pendahuluan

Sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dewasa ini, salah satu sasaran utamanya adalah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengoptimalkan PAD diharapkan tiap-tiap daerah mampu mengelola, mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan otonomi daerah diserahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritasnya.

Pembiayaan pembangunan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Oleh sebab itu setiap daerah harus mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki agar dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan baru. Setiap pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Sumber pendapatan tersebut dapat diperoleh dari potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Sumber pendapatan daerah berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi parkir merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur Dalam UU No. 28 tahun 2009 pasal 110 ayat 1(e) yang kemudian oleh pemerintah Kota Surabaya diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk cukup banyak. Hal tersebut menjadikan retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial bagi kota Surabaya. Menurut data dari Dinas Perhubungan kota Surabaya, jumlah kendaraan di kota Surabaya hingga bulan Januari 2012 mencapai 10,1 juta lebih. (<http://www.bpm.jatimprov.go.id>). Jumlah tersebut belum termasuk jumlah kendaraan dari luar kota yang masuk ke kota Surabaya. Dari banyaknya jumlah kendaraan tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran besarnya pendapatan yang dapat diperoleh dari retribusi parkir.

Dari berbagai penjelasan penulis diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji implementasi kebijakan Peraturan daerah Kota Surabaya

Nomor 8 tahun 2012 dengan mengacu 4 faktor yang ada pada teori Goerge Edward III, yaitu (1) Komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi; (2) Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (staff), anggaran (budgetary), fasilitas (facility), informasi dan kewenangan (information and authority), (3) disposisi yang meliputi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab; serta (4) struktur birokrasi yang meliputi Standart Operating Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang menjadi dasar diadakannya suatu penelitian. Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat ditarik suatu perumusan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah :

“Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Taman Bungkul Surabaya?”

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Taman Bungkul Surabaya.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- Diharapkan dapat memberikan masukan bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu administrasi negara mengenai implementasi kebijakan.

Manfaat Praktis

- Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya dalam bidang ilmu administrasi Negara, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai implementasi kebijakan.
- Sebagai bahan pertimbangan Pemkot maupun instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan khususnya mengenai penyelenggaraan parkir dan retribusi parkir di kota Surabaya, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi pada daerah untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.

- Dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai implementasi kebijakan, dalam hal ini implementasi dari peraturan daerah.

Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam penelitian. Data-data tersebut tidak hanya dikumpulkan tetapi juga dianalisis untuk mengetahui jawaban yang benar. Untuk itu diperlukan suatu kerja atau Metode Penelitian.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha memberikan gambaran yang cermat dan lengkap tentang obyek yang diteliti (Rianse, 2008 : 26). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Taman Bungkul Surabaya.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari kebijakan tersebut, yaitu yang terdiri dari : (1) Struktur birokrasi dalam instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan kota Surabaya khususnya pada UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan kota Surabaya selaku pelaksana teknis retribusi parkir. Dalam Struktur birokrasi tersebut terdapat dua karakteristik utama yakni *Standart Operational Procedure* (SOP) dan Fragmentasi. (2) Sumber Daya Organisasi yang terdiri dari Staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang terdapat dalam instansi terkait. (3) Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. (4) Komunikasi, baik antar individu, kelompok, maupun antar dinas-dinas yang terkait dalam implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Terdapat 3 variabel yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi yakni : Transmisi, Kejelasan, Konsistensi.

Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Taman Bungkul Surabaya karena taman bungkul surabaya merupakan jantung kota surabaya, yang letaknya sangat strategis dengan segala ketersediaan fasilitas yang ada sehingga setiap harinya tidak pernah sepi pengunjung.

Dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang, secara otomatis jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir ditempat tersebut juga banyak. Hal tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian di Taman Bungkul Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Metode Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur. Teknik wawancara akan dilakukan kepada Kepala UPTD Parkir wilayah timur pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai pelaksana teknis retribusi parkir, Juru Parkir, dan Pengunjung Taman Bungkul Surabaya.

Metode Observasi

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti yaitu retribusi parkir di Taman Bungkul Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pasal sebagai peraturan yang mendasari pelaksanaan retribusi parkir di kota Surabaya.

Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip, buku-buku pedoman tentang pendapat, teori, dan dalil-dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Nawawi, 2003).

Metode dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berisi tentang peraturan, prosedur tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir di Taman Bungkul Surabaya serta gambaran umum tentang Taman Bungkul Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2005 : 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam menganalisis data penelitian ini akan mengacu pada model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga selesai, yakni : reduksi

data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions : drawing/verifying*).

Pembahasan

Pada dasarnya sebuah kebijakan publik terbentuk ketika dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan yang kompleks sehingga menuntut adanya sebuah tindakan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Udoji (Wahab, 1997:5) bahwa kebijakan publik adalah sebagai *an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large* (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Kebijakan publik tidak berarti apa-apa tanpa adanya implementasi. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya Leo Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan tindakan yang dibuat oleh pemerintah guna menjawab permasalahan yang terjadi di Surabaya khususnya permasalahan terkait dengan tingginya kebocoran retribusi parkir di Kota Surabaya khususnya di Tepi Jalan Umum. Tujuan dengan dibentuknya kebijakan tersebut adalah agar kebocoran retribusi parkir tersebut dapat ditekan, sehingga kedepannya kebocoran retribusi parkir lebih sedikit bahkan tidak ada lagi kebocoran retribusi parkir di Kota Surabaya.

Berdasarkan analisis dari kajian teori, implementasi kebijakan publik memiliki unsur-unsur penting yang terkandung didalamnya. Berikut keterkaitannya dalam penelitian ini :

Unsur Pelaksana

Pelaksana merupakan pihak yang memiliki peran paling penting dalam sebuah proses kebijakan publik. Pelaksana kebijakan atau dapat disebut sebagai

administrator adalah pihak yang menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya, hasil analisis perumusan kebijakan tersebut diuraikan menjadi sebuah bentuk kebijakan administratif. Berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pelaksana kebijakan adalah Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya yakni melalui UPTD Parkir Wilayah Timur. Namun dalam penelitian ini ditemukan beberapa pihak lain yang terlibat yakni Satpol PP, Polrestaes Surabaya, Organisasi Masyarakat setempat, dan Paguyuban Trisila yang terdapat di Taman Bungkul Surabaya. Ketidaksesuaian pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan dalam perda kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 dengan para pelaksana yang ada dilapangan dapat menghambat proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Program

Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Grindle (Tachjan, 2006:31) bahwa *"Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect"*. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standart yang harus dipedomani. Berdasarkan penelitian ini program-program yang bersifat operasional yakni mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dari hasil pengamatan program-program yang tertulis dalam perda kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah cukup jelas.

Target Group

Target group yaitu kelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Berdasarkan penelitian ini target group yang dimaksud adalah para pengunjung Taman Bungkul Surabaya.

Struktur Birokrasi

Memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005 : 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah cukup jelas namun implementor yang terkait dengan kebijakan tidak memahami *Standard Operational Procedure* (SOP) yang tertulis dalam Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi yang kemudian disesuaikan lagi dengan Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Selain itu pihak-pihak terkait yang telah ditentukan dalam kebijakan tidak sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Semakin banyak pihak yang terlibat akan memunculkan berbagai ide serta gagasan yang berbeda, yang terjadi nantinya adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan tidak seragam dan hal tersebut akan menghambat proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Edwards III (1980 : 11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “*Staff, information, authority, facilities*.”

Staff (Staf)

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Dalam penelitian ini Staf yang dimaksud adalah Staf UPTD Parkir Wilayah Timur sebagai pelaksana teknis tugas-tugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait dengan retribusi parkir. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kinerja para staf UPTD Parkir Wilayah Timur pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat dikatakan buruk.

Information (Informasi)

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Informasi dalam penelitian ini adalah informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksana kebijakan serta organisasi terkait tidak memahami informasi tersebut. Ketika informasi tersebut tidak dapat dipahami oleh Pelaksana Kebijakan atau Administrator maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan.

Authority (Kewenangan)

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian ini kewenangan para Pelaksana Kebijakan

tidak digunakan dengan baik. Para pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk menertibkan para Juru Parkir yang tidak mematuhi peraturan terkait dengan retribusi parkir. Namun yang terjadi mereka justru acuh dan seolah membenarkan hal tersebut.

Facilities (Fasilitas)

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Terkait dengan penelitian ini fasilitas yang didapat oleh para Implementor sudah cukup memadai, namun hal tersebut tidak didukung dengan kinerja mereka dalam menunjang keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Disposisi

Menurut Edward III “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Terkait dengan penelitian ini sikap yang ditunjukkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai implementor. Sikap yang ditunjukan justru dapat menghambat implementasi kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006 : 157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketiga variabel dalam komunikasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga menyebabkan informasi-informasi yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak dapat dipahami oleh berbagai pihak, baik implementor maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga

ketika informasi tersebut tidak dapat dipahami oleh implementor atau pelaksana kebijakan, maka proses implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak akan berjalan.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan melihat tujuan dilakukannya penelitian ini, maka kesimpulan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Taman Bungkul Surabaya adalah sebagai berikut :

Dilihat dari faktor struktur birokrasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya sudah cukup jelas, namun para pelaksana dilapangan dalam hal ini UPTD Parkir Wilayah Timur kurang memahami Standart Operational Procedure (SOP) selain banyaknya campur tangan dari pihak-pihak yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat menghambat proses implementasi. Dari faktor sumber daya, dapat sumber daya yang ada memiliki banyak kekurangan sehingga tidak mampu menunjang implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012. Kemudian dari faktor Disposisi atau sikap yang ditunjukkan oleh Pelaksana Kebijakan atau implementor tidak mendukung proses implementasi kebijakan. Selanjutnya dilihat dari faktor komunikasi, komunikasi yang terjadi tidak berjalan dengan baik sehingga implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak berjalan.

Daftar Pustaka

Adegustara, Frenadin. dkk. 2010. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Tiga Daerah di Propinsi Sumatera Barat)*. Artikel (Online), (<http://lp.unand.ac.id>, diakses pada tanggal 18 Februari 2011).

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Ismail, Nawawi. 2009. *Public Policy Analisis: Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.

Miles, Matthew B dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Riant Nugroho, Dwidjowijoto. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.

Riwukaho, Josef. dkk. 1996. *Laporan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peningkatan Pendapatan Sendiri oleh Daerah*. Jakarta: Kerjasama Universitas Gadjah Mada dan Departemen Dalam Negeri RI.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soenarko. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Jakarta: Airlangga University Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Surami, Sri. 2002. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).

Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi UNESA. 2006. *Panduan Penulisan dan Penilaian Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Jumlah Kendaraan Bermotor, (<http://www.bpm.jatimprov.go.id>, diakses pada tanggal 18 Juli 2013).

Mif. 2010. *Jalanan Surabaya Tak Sanggup Tampung Jumlah Kendaraan*, (<http://www.surya.co.id/27/11/10/jalanan-surabaya-tak-sanggup-tampung-jumlah-kendaraan.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2013).

Taman Bungkul Surabaya (<http://www.iftfishing.com/city/?p=1618.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2013).

Kebocoran Retribusi Parkir Surabaya Masih Tinggi,
(<http://www.rri.co.id/index.php> diakses Pada 26
Desember 2013).